**PERAN KOMITE AUDIT DALAM PENERAPAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PERUSAHAAN**

**Oleh
Utami Puji Lestari
Universitas Sunan Giri Surabaya**

ABSTRACT

In the business world, the term Good Corporate Governance is familiar. Now many companies are applying the principles of GCG. Good Corporate Governance is one of the keys to a company's success to grow and be profitable in the long term. Good Corporate Governance (GCG) has become a hot topic in the business world in the early 21st century. The company runs and develops the company cleanly, complies with applicable laws and cares about the environment based on high socio-cultural values. However, efforts to build GCG are not as easy as turning the palm of the hand, but require commitment, consistency, and sincerity from various related parties, namely company management, employees, commissioners, shareholders, regulators (government) and other stakeholders. With the consistent and consistent implementation of GCG principles, it is hoped that the company will benefit from becoming a Sustainability Company.

Keywords: Good Corporate Governance, Corporate Vision, Sustainability Company

PENDAHULUAN

Sampai saat ini gaung *good corporate governance* masih menggema dimana-mana. Secara garis besar, Good Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang mencakup asas hak dan perlakuan yang adil dari para pemegang saham dan pemangku kepentingan untuk mengikuti perilaku bisnis yang etis dan dengan praktik kerja yang terintegritas.

Penerapan prinsip Good Corporate Governance merupakan strategi penting dalam membangun kepercayaan pasar dan mendorong arus investasi yang lebih stabil dan dalam jangka panjang. Praktik dari prinsip ini juga diarahkan untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Ada tiga pilar utama dari prinsip Good Corporate Governance yang merupakan etika dan menjadi acuan bagi semua perusahaan untuk menjalankan bisnis dengan baik. Negara sebagai pembuat peraturan perundang-undangan dan penegak hukum untuk menunjang iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan. Dunia usaha sebagai pelaku pasar yang menerapkan Good Corporate Governance sebagai pedoman dasar menjalankan perusahaan. Masyarakat sebagai pengguna produk atau jasa dan pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan berperan melakukan kontrol sosial secara objektif.

Menurut Newel & Wilson (2002) secara teoritis, praktik *good corporate governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan secara umum

meningkatkan kepercayaan investor. Sebaliknya praktik corporate governance yang buruk dapat menurunkan tingkat kepercayaan para investor. Hal ini diperkuat dengan hasil survey yang dilakukan oleh McKinsey & Company (2002) yang menunjukkan bahwa corporate governance menjadi perhatian utama para investor menyamai kinerja finansial dan potensi pertumbuhan, khususnya bagi pasar-pasar yang sedang berkembang (emerging market). Dalam hal ini mereka cenderung menghindari perusahaan-perusahaan yang buruk dalam penerapan corporate governance. Corporate governance dipandang sebagai kriteria kualitatif penentu. Dan di mata investor, Indonesia termasuk negara di Asia terburuk (very poor) dalam kualitas penerapan good corporate governance. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain kecuali bahwa korporasi-korporasi baik perusahaan-perusahaan publik maupun perusahaan-perusahaan terbuka di pasar modal harus mulai melihat dan menerapkan good corporate governance dan bukan sebagai aksesoris belaka, tetapi suatu sistem nilai dan best practices yang sangat fundamental bagi peningkatan nilai perusahaan.

Indonesia mulai menerapkan GCG sejak penandatanganan *letter of intent* (LOI) dengan International Monetary Fund (IMF) pada 1998. Salah satu bagian penting LOI adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Untuk itu, mereka mempunyai tanggung jawab menerapkan standar GCG yang telah diterapkan di tingkat internasional. Dalam hal ini peran komite audit diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan. Jadi bagaimanakah peran komite audit dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) perusahaan?

GOOD CORPORATE GOVERNANCE, PRINSIP DAN TAHAPAN

Secara umum *Good Corporate Governance* (GCG) dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham / pemilik modal, komisaris / dewan pengawas dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai etika. *Good corporate governance* dapat pula diartikan sebagai mekanisme pengelolaan perusahaan untuk memastikan bahwa tindakan manajemen akan selalu diarahkan pada peningkatan nilai perusahaan (Baridwan, 2003). Selain itu *Good corporate governance* (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (value add ed) untuk semua *stakeholder* (Monks, 2003 dalam Thomas, 2006). Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari *good corporate governance* yaitu:

1. *Fairness* (keadilan), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* (pemegang saham) serta menjamin terlaksananya komitmen kepada para investor.
2. *Transparency* (keterbukaan informasi), yaitu mewajibkan adanya keterbukaan informasi dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan, tepat waktu serta jelas dan keterbukaan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan.
3. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
4. *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
5. *Independency* (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Dalam menerapkan GCG pada umumnya perusahaan-perusahaan menggunakan tahap-tahap sebagai berikut (Chinn, 2000; Shaw, 2003):

A. Tahap Persiapan Penerapan GCG

Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama:

- 1) *awareness building*,
Awareness building merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok.
- 2) *GCG assessment*,
GCG Assessment merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penetapan GCG saat ini. Langkah ini perlu guna memastikan titik awal level penerapan GCG dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan GCG secara efektif. Dengan kata lain, *GCG assessment* dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek apa yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu, dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mewujudkannya.
- 3) *GCG manual building*.
GCG manual building, adalah langkah berikut setelah *GCG assessment* dilakukan. Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan *manual* atau pedoman implementasi GCG dapat disusun. Penyusunan *manual* dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli

independen dari luar perusahaan. Manual ini dapat dibedakan antara *manual* untuk organ-organ perusahaan dan *manual* untuk keseluruhan anggota perusahaan, mencakup berbagai aspek seperti:

- a. Kebijakan GCG perusahaan
- b. Pedoman GCG bagi organ-organ perusahaan
- c. Pedoman perilaku
- d. Audit committee
- e. Kebijakan disclosure dan transparansi
- f. Kebijakan dan kerangka manajemen resiko
- g. Roadmap implementasi

B. Tahap Implementasi Penerapan GCG

Ada 3 langkah utama dalam tahap implementasi yakni:

- 1) Sosialisasi, diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan yang terkait dengan implementasi GCG khususnya mengenai pedoman penerapan GCG. Upaya sosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk itu, langsung berada di bawah pengawasan direktur utama atau salah satu direktur yang ditunjuk sebagai GCG *champion* di perusahaan.
- 2) Implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang ada, berdasar *roadmap* yang telah disusun. Implementasi harus bersifat *top down approach* yang melibatkan dewan komisaris dan direksi perusahaan. Implementasi hendaknya mencakup pula upaya manajemen perubahan (*change management*) guna mengawal proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG.
- 3) Internalisasi, yaitu tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan GCG di dalam seluruh proses bisnis perusahaan kerja, dan berbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan GCG bukan sekedar dipermukaan atau sekedar suatu kepatuhan yang bersifat *superficial*, tetapi benar-benar tercermin dalam seluruh aktivitas perusahaan.

C. Tahap Evaluasi Penerapan GCG

Tahap evaluasi penerapan GCG adalah tahap untuk mengukur secara teratur dari waktu ke waktu sejauh mana efektivitas penerapan GCG telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit terhadap implementasi dan penilaian atas praktik GCG yang ada.

KOMITE AUDIT

Komite audit adalah suatu badan yang berada di bawah Dewan Komisaris dan merupakan kepanjangan tangan dari Dewan Komisaris dalam mengawasi jalannya kegiatan perusahaan. Komite ini bertugas membantu tugas dewan komisaris dalam bidang kebijakan akuntansi, pengawasan internal, maupun pelaksanaan laporan keuangan. Komite audit bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris. (Atiek, 2005).

Melihat betapa pentingnya keberadaan Komite Audit, maka serangkaian ketentuan mengenai Komite Audit telah diterbitkan di Indonesia, antara lain:

1. Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) (Maret, 2001) yang menganjurkan semua perusahaan di Indonesia memiliki Komite Audit
2. Surat Edaran BAPEPAM No. SE-03/PM/2000, yang merekomendasikan perusahaan-perusahaan publik memiliki Komite Audit, sebagaimana diperbaharui dengan keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-41/PM/2003, tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan Nomor IX.1.5.: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
3. Kep. 339/BEJ/07-2001, yang mengharuskan semua perusahaan yang listed di Bursa Efek Jakarta memiliki Komite Audit
4. Keputusan Menteri BUMN No. Kep-103/MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai Komite Audit.
5. Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai Komite Audit.

Salah satu prasyarat penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di BUMD dan semua perusahaan Publik Indonesia adalah keberadaan Komite Audit di dalam organisasi perusahaan. Khusus untuk BUMN keberadaan Komite Audit adalah suatu keharusan bagi BUMN yang termasuk dalam kriteria sebagai berikut:

1. Mempunyai kegiatan usaha di bidang asuransi dan jasa keuangan lainnya
2. Menjadi PT Terbuka
3. Berada dalam persiapan privatisasi
4. Asetnya bernilai sekurang-kurangnya Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah)

Kualitas Komite Audit juga memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan apakah komite audit ini efektif atau tidak. Kualitas yang perlu disoroti adalah bahwa anggota komite audit harus:

1. memiliki integritas
2. memiliki dedikasi dalam hal waktu dan energi
3. memahami bisnis baik dari segi produksi maupun pelayanannya
4. memiliki pengetahuan mengenai resiko dan pengawasan dalam perusahaan
5. memiliki kemampuan untuk menilai secara adil
6. memiliki komunikasi yang baik terutama dalam memberikan pandangan atau usulan yang membangun

Tingkat keefektifan Komite Audit dapat diukur dengan:

1. Bagaimana kecukupan internal control dan risk management system dalam perusahaan
2. Bagaimana keterbukaan dalam pelaporan keuangan yang berkualitas dan audit eksternal yang objektif dan wajar
3. Bagaimana ketaatan perusahaan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menciptakan komite audit yang efektif adalah:

1. harus ada struktur atau ketentuan dasar yang jelas, seperti charter dan pelaporan
2. proses diikuti secara konsisten
3. SDM yang kompeten, obyektif dan konsisten
4. bersedia untuk belajar dari budaya yang ada

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/2002, disebutkan bahwa tujuan dibentuknya Komite Audit adalah membantu komisaris dan dewan pengawas dalam memastikan efektifitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal auditor. BAPEPAM SE-03/PM./2000 menyatakan bahwa tujuan Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris untuk:

1. meningkatkan kualitas laporan keuangan
2. menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan
3. meningkatkan efektifitas fungsi internal audit maupun eksternal audit
4. mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.

Menurut SK. Dir. BEJ no. 315/BEJ/06-2000 Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi:

1. Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan
2. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik
3. Menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua resiko telah dipertimbangkan
4. Menelaah efektifitas pengendalian internal perusahaan
5. Menelaah tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dalam menjalankan usahanya
6. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan keputusan rapat direksi

Sedangkan menurut Pedoman *Good Corporate Governance*, tugas dan tanggung jawab Komite Audit, antara lain meliputi:

1. mendorong terbentuknya struktur pengawasan internal yang memadai
2. meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan
3. mengkaji ruang lingkup dan ketepatan eksternal audit, kewajaran biaya eksternal audit serta kemandirian dan obyektivitas eksternal auditor

Struktur Komite Audit diatur dalam Kep.men 117/2002 untuk perusahaan BUMN dan untuk perusahaan public diatur dalam keputusan BEJ dan peraturan BAPEPAM. Ketentuan mengenai Struktur Komite Audit menurut keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-14 /PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang peraturan No. IX.1.5: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah:

- a. Anggota Komite audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang saham
- b. Anggota Komite audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Independen. Dalam hal ini Komisaris Independen

yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

Pelaporan Komite Audit keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-41/PM/2003, tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan Nomor IX.1.5.: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, adalah

- a. Komite audit membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan
- b. Komite Audit membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan komisaris.

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya. Efektivitas good corporate governance tidak terlepas dari kerangka legal dan ekonomi (legal and economic framework) suatu negara. Sebagai suatu governance system ia dipengaruhi oleh kerangka legal dan ekonomi tersebut dan pada gilirannya mempengaruhi kerangka tersebut. Tantangan terbesar dan unik bagi perusahaan-perusahaan publik dalam penerapan good corporate governance mungkin bukan lagi kekurangan legal references, melainkan tantangan untuk mengubah kultur perusahaan yang umumnya sudah mengakar melalui kepemimpinan yang lugas, kompeten dan memiliki integritas tinggi. Terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan good corporate governance di Indonesia. Kendala-kendala dimaksud antara lain kendala di bidang hukum, budaya, politik, dan lingkungan bisnis. Oleh sebab itu diperlukan upaya kolektif dari berbagai pelaku pasar/bisnis termasuk regulator, akuntan, dewan komisaris, dan lain-lain untuk mensosialisasikan manfaat, kegunaan, dan pentingnya good corporate governance sehingga timbul kesadaran akan pentingnya praktik good corporate governance bagi peningkatan kinerja dan kesinambungan perusahaan. Penerapan good corporate governance bisa dilihat sebagai tantangan sekaligus bisa dilihat sebagai kesempatan, dimana pada saat ini good corporate governance bukan saja dirasakan sebagai pressure di Indonesia tetapi juga di semua belahan dunia, maka bila perusahaan di Indonesia dapat lebih cepat dan tepat bertindak dari pesaing-pesaing mereka (terlepas masih banyaknya kekurangan-kekurangan secara makro) maka mereka dapat mempertahankan keberadaan dan meningkatkan kinerja serta menjaga sustainability usaha yang berkualitas di Indonesia. Adanya pendapat yang menyatakan bahwa hasil yang diperoleh dari implementasi good corporate governance masih belum sesuai dan merupakan suatu indikasi bahwa model good corporate governance yang diadopsi perlu diadakan penyesuaian berdasarkan kondisi lokal dan karakteristik perusahaan di Indonesia.

PENUTUP

Salah satu cara dalam menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) suatu perusahaan adalah dengan membentuk Komite Audit. Oleh karenanya keberadaan Komite Audit dalam suatu perusahaan menjadi dasar apakah suatu perusahaan telah melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik. Membangun peran Komite Audit yang efektif tidak terlepas dari kualitas anggota Komite Audit dan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate*

Governance (GCG) antara lain independensi, transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab, sikap adil dan kemandirian menjadi prinsip suatu perusahaan. Pembentukan Komite Audit pada dasarnya diharapkan dapat membantu dewan Komisaris dalam memperoleh informasi mengenai kondisi perusahaan dan bertanggung jawab membantu auditor internal maupun eksternal dalam mempertahankan independensinya dari manajemen perusahaan. Jadi Komite Audit merupakan kepanjangan tangan Dewan Komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan dan bertugas membantu Dewan Komisaris dalam bidang kebijakan akuntansi, pengawasan internal maupun pelaksanaan laporan keuangan. Peran Komite Audit dalam menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) suatu perusahaan diharapkan dapat mengawasi jalannya kegiatan perusahaan secara optimal guna menciptakan iklim disiplin dan pengendalian, sehingga dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atiek, Sri Purwati, 2005, Eksistensi dan Peran Komite Audit dalam Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), JEBA (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi), Vol 7 No. 2, Unsoed Purwokerto.
- Darmawan, D. 2003. Teori Pengambilan Keputusan. Universitas Atmajaya, Yogyakarta
- Herris B. Simandjuntak, 2010, Legal Culture: Kendala Penerapan GCG di Indonesia
www.infobanknews.com
- _____, 2001, Komisaris Independen dan Komite Audit, INDONESIAN SOCIETY OF COMMISSIONERS <http://www.isicom.or.id>
- _____, 2003, *Good Corporate Governance* BPKP <http://www.bpkp.go.id>
- _____, 2004, Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-41/PM/2003, tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan Nomor IX.1.5.: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. *Audithor*. 12/2004
- Nugroho, D. R., dan Siahaan, R. 2005. BUMN Indonesia Isu, Kebijakan, dan Strategi. PT Elex Media Komputindo.
- Permono, Iswardono S., & D. Darmawan. 2000. Analisis Efisiensi Industri Perbankan di Indonesia (Studi Kasus Bank-Bank Devisa di Indonesia Tahun 1991-1996), *Journal of Indonesian Economy and Business*, 15(1), 1-13.
- Sjamsi, N. & D. Darmawan. 2004. Peran Startegis Layanan pada Penyelenggaraan Pelayanan Publik, *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 83-95.
- Thomas S. Kaihatu, 2006, *Good Corporate Governance* dan Penerapannya di Indonesia, *JURNAL MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN*, VOL.8, NO. 1, MARET 2006, <http://www.petra.ac.id/>
- Tjager, I. N., Alijoyo, F. A., Djemat, H. R., dan Soembodo, B. 2003. Corporate Governance, Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia. PT Prenhallindo.
- Zaki Baridwan, 2000, Komite Audit Tidak Melakukan Audit, *Auditor* Edisi 11/2003